

Trust-politik Korea Selatan kepada Korea Utara dalam Konteks Reunifikasi Korea Pada Pemerintahan Park Geun-hye

South Korea Trust-politics to North Korea in The Context of Korean Reunification in Park Geun-hye Administration

Esty Fidhela Muliawati, Widya Setiabudi & Wawan Darmawan*

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran Indonesia

Diterima: 31 Mei 2021 Direview: 31 Mei 2021; Disetujui: 08 Agustus 2021

*estvfidhela@gmail.com:

Abstrak

Reunifikasi Korea adalah suatu hal yang terus di bicarakan pada setiap pemerintahan presiden-presiden Korea Selatan. Konsep politik luar negeri Presiden Korea Selatan ke-11, Park Geun-hye dikenal dengan Trust-politik Policy. Trust-politik adalah filosofi politik Presiden Park yang menyeluruh. Ini adalah visi serta alat kebijakan yang di terapkan dalam politik domestic dan hubungan internasional. Pada intinya terletak konsep kepercayaan. Politik Trust-politik, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Politik ini berusaha membangun harapan saling mengikat berdasarkan norma-norma global. Tujuan dari masalah dalam penelitian ini yaitu untuk mengetahui ide reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara semasa Presiden Park serta menjelaskan Trust-Politik Policy Korea Selatan kepada Korea Utara dalam konteks Reunifikasi Korea. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik studi literature dalam proses mengumpulkan data. Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis data, reunifikasi dapat dilakukan dengan tiga scenario reunifikasi Korea yaitu unification through system evolution and adaptation, unification through collapse and absorption, dan unification through conflict. Serta faktor idiosyncratic yang mempengaruhi Park dalam politik ini adalah faktor kepemimpinan, kepercayaan, budaya, dan sistem politik.

Kata Kunci: Trust-Politik; Reunifikasi; Korea Selatan; Korea Utara; Park Geun-hye.

Abstract

The reunification of Korea is something that has been continuously discussed in every government of the presidents of South Korea. The concept of foreign policy of the 11th President of South Korea, Park Geun-hye, is known as Trust-Politics Policy. Trust-politics is President Park's overarching political philosophy. It is a vision and a policy tool applied to domestic politics and international relations. At its heart lies the concept of trust. Trust-Political Policy, influenced by internal and external factors. This politics seeks to build mutually binding expectations based on global norms. The purpose of the problem in this research is to find out the idea of reunification of South and North Korea during President Park and to explain South Korea's Trust-Political Policy to North Korea in the context of Korean Reunification. Researchers used qualitative research methods with literature study techniques in the process of collecting data. Based on the results of discussion and data analysis, reunification can be carried out using three Korean reunification scenarios, namely unification through evolution and adaptation systems, unification through collapse and absorption, and unification through conflict. As well as the idiosyncratic factors that influence Park in politics are factors of leadership, belief, culture, and the political system.

Keywords: Trust-Politik; Reunification; South Korea; North Korea; Park Geun-hye.

How to cite: Muliawati, E.F. Setiabudi, W. & Darmawan, W. (2021) Trust-politik Korea Selatan kepada Korea Utara dalam Konteks Reunifikasi Korea Pada Pemerintahan Park Geun-hye, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2) 809-820



PENDAHULUAN

Korea Selatan dan Korea Utara terbentuk setelah Perang Dunia ke II dan awal Perang Dingin. Dari tahun 1910 hingga kekalahan Jepang pada akhir perang tahun 1945, seluruh semenanjung Korea telah dicaplok dan diduduki oleh pasukan Jepang. Di tengah ketidaksepakatan antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet, Korea kemudian terpecah menjadi Korea Utara—di bawah pemerintahan Uni Soviet—dan Korea Selatan—dikelola oleh AS. Pada 9 September 1948, Republik Demokrat Rakyat Korea lahir di Korea Utara, dipimpin oleh anggota Partai Pekerja Korea dan mantan pejuang gerilya Kim Il Sung.

Hubungan Korea Utara-Korea Selatan adalah hubungan bilateral antara Demokratik Rakyat Republik Korea (Korea Utara) dan Republik Korea (Korea Selatan). Sebelumnya adalah satu negara yang diambilalih oleh Kekaisaran Jepang pada tahun 1910, dan kedua negara ini telah terpecah sejak akhir Perang Dunia II pada tahun 1945. Korea Utara adalah negara satu partai yang dijalankan oleh dinasti Kim.

Korea Selatan sebelumnya diperintah oleh kediktatoran militer satu partai sampai dengan tahun 1987 ketika mereka memulai mengadakan pemilihan langsung. Kedua negara ini mengklaim seluruh semenanjung Korea. Kedua negara ini juga bergabung dengan PBB pada tahun 1991 dan diakui oleh sebagian besar negara anggota. Sejak 1970-an, kedua negara ini memulai dialog diplomatik informal untuk meredakan ketegangan militer. Korea Utara dan Selatan tidak pernah menandatangani perjanjian perdamaian dan dengan demikian secara resmi masih dalam status perang, hanya sebuah gencatan senjata yang diumumkan.

Reunifikasi Korea adalah suatu hal yang terus dibicarakan pada setiap pemerintahan presiden-presiden. Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Kim Dae Jung dan Roh Moo Hyun pada 1998-2007 menggunakan politik luar negeri yang dinamakan *Sunshine Policy*. Namun, pada masa pemerintahan Presiden Lee Myung Bak dan Park Geun Hye pada 2008-2017 strategi ini ditinggalkan. Reunifikasi Korea tidak hanya melibatkan kedua negara tetapi juga negara-negara lain, termasuk negara di kawasan.

Konsep politik luar negeri Presiden Korea Selatan ke-11, Park Geun Hye dikenal dengan *Trustpolitik Policy*. Pada awal pemerintahan setelah merdeka, Korea Selatan lebih mengedepankan aliansi militer dengan AS serta pemimpin dari kalangan militer demi memprioritaskan stabilitas keamanan dalam negeri. Politik Korea Selatan menyesuaikan dengan dinamika perubahan tatanan internasional namun masih sebatas upaya agar mampu bertahan dari ancaman invasi Korea Utara. Setelah dilantik menjadi Presiden Korea Selatan, Park Geun Hye mengimplementasikan politik *Trustpolitik Policy* untuk mengubah Semenanjung Korea dari zona konflik menjadi zona kepercayaan. (Sheen, 2014)

Politik *Trustpolitik Policy* ini merupakan perkembangan evolusi politik luar negeri Korea Selatan terhadap Korea Utara dalam mengimplementasikan politik luar negerinya pada masa pemerintahan Park: kebijakan "*trust-politik*". Hal tersebut dikarenakan kebijakan *Trust-politik Policy* didasarkan pada "*trust-politik*" yaitu "saling membangun kepercayaan" antar kedua Korea berdasarkan norma global sekaligus untuk menangkal ancaman dari Korea Utara seiring dengan eskalasi militer provokatifnya. Politik *Trust-politik Policy*, dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Politik ini berusaha membangun harapan saling mengikat berdasarkan norma-norma global. Politik baru ini diterapkan oleh Park dengan melihat faktor eksternal yaitu eskalasi ancaman dari Korea Utara, adanya dukungan internasional kepada Korea Selatan, adanya sanksi PBB terhadap Korea Utara, serta menguatnya aliansi Korea Selatan-AS. Sedangkan, faktor internal yaitu perubahan haluan Partai Saenuri (partai Park), Persepsi Park terhadap Korea Utara, dan Peran NGOs dan *Civil Society* Korea Selatan. Politik ini bertumpu pada sikap membangun "kepercayaan" untuk digunakan sebagai ruang diplomasi, dimana membangun kepercayaan di Semenanjung Korea adalah salah satu manifestasi kebijakan *Trust-politik Policy* di bawah pemerintahannya.

Park menerapkan politik luar negeri yang cukup berbeda dengan pemimpin sebelumnya. Dimana politik *Trust-politik* sangat mengedepankan konsep "*trust*" dalam setiap proses yang akan dijalankan. *Trust* menurut Park sebagai sebuah inti nilai terhadap keseluruhan filosofi politik yang

menjadi aset yang dibutuhkan dalam membantu pengembangan kerja sama tidak hanya antar individu tapi juga antar bangsa. Selain itu, *trust* didefinisikan sebagai aset dan sarana umum untuk kerja sama internasional serta sebagai unsur yang sangat diperlukan dalam menciptakan perdamaian yang nyata. Perdamaian tanpa konsep *trust* merupakan suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan, karena kesungguhan dalam proses *trust* membutuhkan waktu dan pendekatan secara bertahap dan konsisten. (Yun, 2013)

Trust-politik adalah filosofi politik Presiden Park yang menyeluruh. Ini adalah visi serta alat kebijakan yang diterapkan dalam politik domestik dan hubungan internasional. Pada intinya terletak konsep "kepercayaan." Kepercayaan adalah aset yang sangat diperlukan yang diperlukan untuk mendorong kerja sama tidak hanya di antara individu, tetapi juga di antara bangsa-bangsa. Ini juga merupakan bentuk modal sosial yang penting bagi masyarakat untuk makmur dengan meningkatkan tingkat efisiensi berbagai bentuk transaksi yang terjadi dalam masyarakat. Lebih jauh, kepercayaan memperkuat solidaritas di antara anggota masyarakat, yang berfungsi sebagai prasyarat bagi masyarakat untuk menjadi komunitas yang lebih bermakna. Dalam hal ini bahwa administrasi Park telah memberikan penekanan besar pada perlunya untuk kembali normal dengan memerangi korupsi dan menghilangkan praktik-praktik tidak adil di masa lalu, dengan harapan membangun masyarakat di mana anggota merasakan rasa dapat diandalkan satu sama lain dengan tingkat tinggi kepercayaan. (Yun, 2013)

Berdasarkan kepercayaan dari rakyat, administrasi ini bertujuan untuk mewujudkan visi administratifnya — kebahagiaan rakyat dan era harapan baru — dengan lima tujuan administratif: (1) ekonomi kreatif dengan penekanan pada pekerjaan, (2) pekerjaan yang disesuaikan dan kesejahteraan, (3) pendidikan dan budaya yang cerdas, (4) keamanan dan integrasi sosial, dan (5) pendirian fondasi era penyatuan untuk kebahagiaan. Ini bermaksud untuk membuka era harapan baru di mana setiap individu di Korea Selatan dapat merasa bahagia berdasarkan kepercayaan orang-orang, "*Trust net*" adalah infrastruktur tak berwujud tetapi penting yang tanpanya Korea Selatan tidak dapat masuk ke klub negara-negara paling maju.

Kepercayaan tidak hanya terbatas pada politik dalam negeri. Ini adalah filosofi pemerintah yang mencakup hubungan internasional dan hubungan Korea Utara-Selatan. *Trustpolitik* adalah strategi besar untuk administrasi President Park. Strategi ini terdiri dari tiga pilar: pencegahan / pertahanan yang kuat, diplomasi kepercayaan, dan proses kepercayaan semenanjung Korea. (Cheon, 2013)

Park Geun-hye menerima gelar doktor kehormatan dari Universitas Teknologi Dresden dan menyampaikan pidatonya yang termasuk dalam kebijakan luar negeri tentang rencana penyatuan Semenanjung Korea, pada hari Jumat 28 Maret 2014 lalu di Dresden, Jerman. Pidato ini dikenal dengan sebutan Pidato Dresden. Dalam pidatonya, Presiden Park menyatakan contoh penyatuan Jerman menjadi modal dan memberikan harapan bagi Korea Selatan untuk menyatukan bangsa Korea dan membuka era unifikasi Korea. Park juga menekankan kerja sama yang erat antar Korea dapat menguntungkan seluruh masyarakat dan memulihkan identitas bangsa. Dia mengusulkan tiga agenda kepada Korea Utara untuk meletakkan landasan penyatuan bangsa yang damai yaitu kemanusiaan, kemakmuran bersama dan integrasi. Melalui pidato ini, Presiden Park menyatakan rencana penyatuan bangsa Korea akan memasuki babak baru, khususnya dalam kerja sama ekonomi dan reuni keluarga terpisah. (Kim, 2015)

Pidato Dresden tersebut masuk kedalam politik luar negeri. Politik tersebut, dalam Pidato Dresden oleh Presiden ke-11 Korsel Park Geun-hye dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya tentang faktor *idiosyncratic* (idiosinkratik). Hubungan internasional individu memiliki peranan yang signifikan, dimana memperhatikan perilaku individu, karena individu sebagai salah satu bagian dari pembuat keputusan atau kebijakan untuk mempengaruhi hasil dari politik luar negeri. Untuk membuat suatu kebijakan individu akan dipengaruhi oleh latar belakang, arus informasi yang diketahui, keinginan yang dimiliki serta tujuan yang hendak dicapai (*occasion for decision*) individu tersebut.

Kuatnya pengaruh seorang individu dalam *decision making process* pada akhirnya memunculkan istilah *idiosyncratic* dalam politik luar negeri. *Idiosyncratic* mempelajari hal-hal

yang mempengaruhi seorang individu dalam pembuatan kebijakan yang berpengaruh pada hubungan luar negeri. Dalam Teori *Idiosyncratic*, model analisis memengaruhi aktor individu dalam pengambilan keputusan kebijakan luar negeri, dikenal dengan istilah persepsi elit dan didefinisikan sebagai hal yang melekat pada seseorang (pemimpin/*leader*). Teori ini dianggap sebagai sebuah level analisis yang paling dasar, namun fundamental karena bagaimana sistem internasional, negara, dan masyarakat terbentuk tidak lepas dari level individu yang menyusunnya. Secara umum, *idiosyncratic* adalah sebuah aspek yang dimiliki oleh pembuat keputusan seperti nilai, bakat, dan pengalaman sebelumnya yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan atau kebijakan yang dilakukannya. Mintz dan DeRouen (2010), membahas tiga indikator penting yang dimasukkan ke dalam model analisis *idiosyncratic*, seperti: Kepribadian Pemimpin (*Leader's Personality*) kepribadian seseorang merupakan integrasi proses yang berpola individual dari persepsi, ingatan, penilaian, pencarian tujuan, dan ekspresi dan regulasi emosional. Gaya Kepemimpinan (*Leadership Style*) ketika menganalisa gaya kepemimpinan seorang presiden di suatu negara, hal tersebut dapat membantu kita untuk memahami lebih dalam mengapa beberapa keputusan tertentu dibuat oleh seorang pemimpin dan mengapa tindakan-tindakan alternatif tidak diambil.

Setidaknya, terdapat 3 (tiga) tulisan yang telah mengulas mengenai trustpolitik dalam sebagai suatu kebijakan/politik luar negeri di suatu negara. Pertama, tulisan yang dilakukan Evita (2015) yang berjudul "Evolusi Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terhadap Korea Utara: Trust-Politik Policy Park Geun-hye." Dalam tulisannya disebutkan bahwa melihat faktor eksternal yaitu eskalasi ancaman dari Korea Utara, adanya dukungan internasional kepada Korea Selatan, adanya sanksi PBB terhadap Korea Utara, serta menguatnya aliansi Korea Selatan-AS. Sedangkan, faktor internal yaitu perubahan haluan Partai Saenuri, Persepsi Park Geun-hye terhadap Korea Utara, dan Peran NGOs dan Civil Society Korea Selatan. Tulisan ini difokuskan pada kebijakan Korea Selatan masa kepemimpinan Park Geun Hye dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara sebagai pembahasan utama.

Kedua, tulisan oleh Ihsan Kurnia (2017) yang berjudul "Trust-Politik Policy Korea Selatan Sebagai Upaya Menurunkan Agresivitas Nuklir Korea Utara". Tulisan ini menjelaskan tentang Trust-Politik sebagai upaya untuk menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara, dengan menggunakan konsep Paul R.Viotti dan Mark V. Kauppi dengan melihat pola perilaku negara. Terdapat unsur-unsur yang mempengaruhi kebijakan luar negeri Trust-Politik sebagai upaya untuk menurunkan agresivitas nuklir Korea Utara. Unsur *threats*, *interest*, *capabilities*, *opportunities* dan *objectives*. Tulisan ini menunjukkan sebab mengapa Korea Selatan menerapkan kebijakan Trust-Politik sebagai upaya menurunkan agresivitas Korea Utara. Hal ini karena melihat adanya ancaman nuklir dari Korea Utara. Berdasarkan ancaman tersebut Korea Selatan berusaha menekan agresivitas nuklir Korea Utara agar bisa menjaga keamanan negara. Selain itu dengan kapabilitas yang dimiliki Korea Selatan, Korea Selatan berusaha untuk mengambil peluang dari ancaman yang datang untuk bisa membujuk Korea Utara untuk membangun kerja sama ekonomi. Hal inilah yang terlihat dalam kebijakan Trust-Politik yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan, pengembangan ekonomi dan pembangunan pondasi unifikasi di Semenanjung Korea.

Adapun tulisan ketiga, ditulis oleh Maria Fernanda Olifera Seran (2018) yang berjudul "Implementasi Kebijakan Trustpolitik Korea Selatan Masa Pemerintahan Park Geun Hye Tahun 2013-2016" menjelaskan kebijakan Trustpolitik memiliki konsep utama yaitu untuk membangun hubungan berdasarkan kepercayaan baik itu dengan Korea Utara maupun dengan komunitas internasional. Kebijakan ini memiliki tiga kerangka utama yaitu Proses Membangun Kepercayaan di Semenanjung Korea, Inisiatif Perdamaian dan Kerjasama di Asia Timur Laut/ NAPCI dan Inisiatif Eurasia. Menunjukkan bahwa pemerintah Korea Selatan telah mengimplementasikan kebijakan Trustpolitik selama masa pemerintahan Park Geun Hye melalui berbagai pendekatan, didasari oleh tiga kerangka utama Trustpolitik. Baik itu melalui normalisasi hubungan Korea Selatan dan Korea Utara melalui dialog langsung dengan pihak Korea Utara, pembuatan proyek-proyek yang melibatkan Korea Utara maupun dengan melakukan pendekatan dengan stakeholder di luar Semenanjung Korea. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Korea Selatan telah



mengimplementasikan kebijakan Trustpolitik selama masa pemerintahan Park Geun Hye melalui berbagai pendekatan, didasari oleh tiga kerangka utama Trustpolitik. Baik itu melalui normalisasi hubungan Korea Selatan dan Korea Utara melalui dialog langsung dengan pihak Korea Utara, pembuatan proyek-proyek yang melibatkan Korea Utara maupun dengan melakukan pendekatan dengan stakeholder di luar Semenanjung Korea.

Masalah kebijakan *trust-politik* telah menjadi perhatian luas di dunia sehingga membuat munculnya tulisan yang membahas tentang kebijakan/politik ini. Dalam hal ini tulisan akan fokus membahas pengambilan keputusan dalam politik luar negeri yang dibuat oleh Korea Selatan pada masa pemerintahan Presiden Park, *Trust-politik*. Berdasarkan penjelasan di atas maka didapatkan pertanyaan masalahnya adalah Bagaimanakah *Trust-politik* Korea Selatan kepada Korea Utara dalam Konteks Reunifikasi Korea Pada Pemerintahan Presiden Park Geun-hye. Salah satu alasan peneliti mengambil isu kajian ini karena dalam tulisan-tulisan terdahulu, semua berfokus kepada pengambilan keputusan dalam berbagai faktor namun, tulisan terdahulu tidak spesifik kepada pengambilan keputusan yang dibuat oleh Rosenau. Selain itu, peneliti merasa perlu adanya kajian mengenai pengambilan keputusan politik luar negeri oleh Rosenau. Secara *time series*, tulisan ini dibatasi pada tahun 2013 sampai 2016 sampai dengan masa pemerintahan Presiden Park berakhir. Adapun tujuan dari masalah dalam penelitian ini yaitu mengetahui ide reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara semasa Presiden Park serta menjelaskan Trust-Politik Policy Korea Selatan kepada Korea Utara dalam konteks Reunifikasi Korea.

METODE PENELITIAN

Kualitatif merupakan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Alasan pemilihan metode kualitatif dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitiannya itu untuk menjelaskan ide Reunifikasidan Trust-Politik Korea. Selain itu, pemilihan metode kualitatif dikarenakan data akan diperoleh dengan cara penggalian data secara mendalam dan detail tentang reunifikasi Korea Selatan dan Korea Utara semasa Presiden Park. Adapun dalam teknik pengumpulan data, Sumber data utama dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. (Moleong, 2006) Peneliti menggunakan teknik studi literatur dalam proses mengumpulkan data. Teknik studi literatur digunakan dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan dan fakta-fakta yang akurat dari keadaan empirik dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reunifikasi Korea

Reunifikasi merupakan sebuah konsep yang erat kaitannya dengan integrasi. Ada beberapa cara untuk mencapai reunifikasi. Seperti yang di sampaikan oleh Charles Wolf Jr., (2005) terdapat tiga skenario reunifikasi Korea yaitu *unification through system evolution and adaptation*, *unification through collapse and absorption*, dan *unification through conflict*.

Unification through System Evolution and Adaptation, *Unification through system evolution and adaption* diprediksikan dapat terjadi melalui perubahan sistem ekonomi dan politik Korea Utara yang menjadi lebih kompatibel dengan Korea Selatan sehingga membuka peluang yang mengarah pada reunifikasi. Korea Utara mungkin mengadopsi dan mengimplementasikan (mungkin dengan langkah cepat) model ekonomi China yang sangat sukses: meliberalisasi sistem ekonomi, membuka perdagangan dan transaksi modal, mengurangi kontrol ekonomi yang terpusat, dan meningkatkan desentralisasi dan pemasaran kegiatan ekonomi. Dalam keadaan ini, sistem ekonomi di Utara akan menjadi lebih cocok dengan yang di Selatan. Prosesnya bisa disamakan dengan pengalaman Cina dan Taiwan. Bahkan, tidak hanya ekonomi di daratan dan Taiwan memperluas transaksi perdagangan dan investasi mereka beberapa kali lipat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi struktur kedua ekonomi menjadi lebih kompatibel, walaupun tentu saja tidak identik.

Dalam keadaan ini, beberapa bentuk federalisme politik antara Korea Utara dan Korea Selatan mungkin dipertimbangkan, termasuk kontak yang lebih dekat antara kedua perusahaan



militer, pelatihan bersama dan latihan militer di antara mereka, dan denuklirisasi Utara. Yang pasti, perkembangan di sepanjang garis ini akan memakan waktu beberapa tahun untuk muncul. Selain itu, mereka mungkin akan terjadi hanya dalam keadaan yang paling menguntungkan dan mungkin kurang masuk akal. Beberapa bukti baru-baru ini, walaupun sedikit membesarkan hati, masih jauh lebih sedikit daripada yang akan membuat skenario ini tampak lebih mungkin daripada hanya dapat dibayangkan.

Peaceful Integration (integrasi yang damai) dapat dianggap sebagai skenario paling optimis, tetapi pada kenyataannya, itu akan sangat sulit untuk dilakukan. Perkembangan antar-Korea semacam itu akan melibatkan langkah-langkah seperti: penerimaan awal status quo oleh kedua Korea dan oleh empat kekuatan utama yaitu Amerika Serikat, Cina, Rusia dan Jepang. Ini dapat digambarkan sebagai model dua tambah dua. Terlebih lagi, saling pengakuan atas model itu akan sangat diperlukan. Langkah selanjutnya akan melibatkan perjanjian perdamaian formal. Diperlukan periode damai yang berdampingan sebelum langkah-langkah ini diambil. Integrasi itu sendiri, akan memerlukan perataan kebijakan masing-masing negara, yang sama sekali berbeda. Kerjasama pada tingkat ekonomi dengan integrasi politik dan sosial yang terbatas diperlukan sebelum langkah berikutnya dapat dicapai (Choi, 2001). Dalam kasus seperti itu, bagian yang paling merepotkan akan menyusul, tidak hanya untuk pejabat pemerintah tetapi terutama untuk dua masyarakat: perubahan struktural berkembang di sepanjang garis pendekatan "satu negara, dua sistem, dua pemerintah" yang ada di dalam proposal untuk penyatuan Republik Korea sebelumnya. Hanya setelah langkah-langkah ini selesai, integrasi damai dapat terjadi. Faktor penting adalah periode waktu yang panjang dari koeksistensi damai, karena pengakuan status quo atau perjanjian formal tanpa beberapa tahun kerja sama yang baik hampir tidak mungkin. Penyatuan melalui integrasi damai dapat diwujudkan, hanya di bawah kontrol eksternal dan tidak memihak.

Pendekatan *gradual* atau bertahap untuk reunifikasi adalah "proses multi-tahap di mana persatuan ekonomi dan politik akan secara bertahap dicapai melalui negosiasi antara Korea Utara dan Korea Selatan." Pendekatan bertahap untuk reunifikasi adalah "proses multi-tahap di mana persatuan ekonomi dan politik akan secara bertahap dicapai melalui negosiasi antara Korea Utara dan Korea Selatan." Ada berbagai teori tentang bagaimana reunifikasi bertahap akan terjadi. Sebagian besar didukung oleh persyaratan bagi Pyongyang untuk menerapkan tingkat reformasi yang diperlukan untuk memungkinkan DPRK untuk mengadopsi undang-undang pasar bebas gaya Cina dalam upaya untuk menahan ekonomi yang berkontraksi. Pada saat yang sama, "tidak ada upaya yang harus dilakukan untuk mendemokratisasi pemerintah Korea Utara. Faktanya model pembangunan ekonomi Tiongkok membutuhkan pemerintah pusat yang otoriter untuk memaksakan reformasi ekonomi dari atas." Reformasi semacam itu perlu disejajarkan dengan peningkatan bertahap dalam kerja sama ekonomi antara Utara dan Selatan sementara langkah-langkah pembangunan kepercayaan militer akan diberlakukan untuk mengurangi biaya dan ukuran struktur kekuatan masing-masing. Langkah-langkah ini kemudian memungkinkan hubungan untuk berkembang melalui pengaturan tipe persemakmuran yang pada akhirnya akan mengarah ke federasi lengkap. (Coughlan, 2008)

Status Quo merupakan skenario yang membuat Korea Utara melakukan kekacauan tanpa batas dan hanya menerapkan perubahan minimal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup negara (reformasi pertahanan sistem). Meskipun frasa "campur aduk" sering digunakan dalam skenario ini, implikasi "kacau" sebagai campur aduk, kusut, dan umumnya tidak terorganisir mungkin tidak sesuai. Selama hampir 20 tahun, Korea Utara menentang prediksi kehancuran dan bertahan — mungkin ada lebih banyak koherensi dengan strategi Korea Utara daripada yang dikreditkan oleh Pyongyang. Seperti yang dicatat oleh Nicholas Eberstadt, bertentangan dengan kebijaksanaan konvensional DPRK sebagai "mitra negosiasi yang tak henti-hentinya bermusuhan," kenyataannya mungkin bahwa semua yang diperlukan untuk mendapatkan jawaban ya dengan DPRK adalah "mengakui setiap poin penting yang diminta oleh Korea Utara sisi sambil mengorbankan kepentingan vital sendiri." Terlepas dari itu, probabilitas

tetap bahwa untuk masa mendatang ini adalah skenario yang akan dimainkan di Semenanjung Korea. (Kim, 2004)

Unification through Collapse and Absorption. *Unification through collapse and absorption* yang memprediksikan terjadinya reunifikasi akibat kemunduran ekonomi dan militer Korea Utara, serta ketidakmampuan pemerintah untuk mengontrol penyelenggaraan negara sehingga muncul kekacauan. Kekacauan ini kemudian mendorong Korea Selatan untuk mengabsorpsi wilayah Korea Utara dan menjadikannya bagian dari Korea Selatan. Rezim Korea Utara telah menunjukkan kemampuan luar biasa untuk menahan kesulitan ekonomi internal yang parah. Sebagian besar kapasitas ini disebabkan oleh ketangkasan dan efektivitas rezim dalam memperoleh rente ekonomi dan sumber dukungan lain dari sumber luar. Sumber daya ini telah dikerahkan untuk mempertahankan dan memperkuat kontrol politik terpusat rezim, terlepas dari efek kelaparan yang diperkirakan mengganggu, penghancuran populasi Korea Utara, dan tanda-tanda resistensi internal yang muncul. Tapi apa yang benar di masa lalu mungkin tidak dapat ditiru di masa depan. (Stankiewicz, 2012)

Jika ekonomi Korea Utara mengalami kemunduran parah lebih lanjut, dan seandainya mereka disertai dengan ketidakmampuan Korea Utara untuk memperoleh sumber daya eksternal yang memadai untuk mempertahankan pendirian militernya yang besar dan industri pertahanan pendukungnya, situasi yang akan datang mungkin berbeda dari masa lalu. Jika kesulitan ekonomi sangat parah dan subversi eksternal terbatas, rezim mungkin tidak dapat mendukung aset militernya dan untuk menjaga ketertiban dan kontrol di wilayah terpisah Korea Utara. Perpecahan mungkin muncul dalam kepemimpinan partai, dan keunggulan Kim Jong Un mungkin dikompromikan. Jika kontak dan komunikasi antara perusahaan militer di Utara dan Selatan sebelumnya telah terjadi, kontak seperti itu dapat diperluas, yang mengarah ke beberapa bentuk rasa hormat dan kerja sama antara perusahaan militer Korea Utara dan Korea Selatan. Dengan bimbingan keuangan yang tepat, ini pada gilirannya dapat mengarah pada demilitarisasi dan denuklirisasi Korea Utara, dan penyerapan rezim Korea Utara ke Korea Selatan. Tentu saja, lintasan ini bukan satu-satunya yang mungkin terjadi setelah "runtuh." Sebaliknya, keadaan berikutnya mungkin memerlukan munculnya panglima perang regional dan konflik di antara mereka — keadaan yang kemudian mungkin terkait dengan skenario penyatuan melalui konflik.

Unification through Conflict. *Unification through conflict* yang memprediksikan terwujudnya reunifikasi melalui Korea Selatan dan Korea Utara yang saling menyerang satu sama lain. Pihak yang menang dapat mendominasi yang kalah. Konflik antara Korea Utara dan Korea Selatan mungkin timbul dari beberapa peristiwa pencetus yang mungkin terjadi: misalnya, invasi Korea Utara ke Korea Selatan berdasarkan pada provokasi nyata atau fantasi dari Korea Selatan; interpretasi Korea Utara tentang suatu provokasi dari Amerika Serikat sebagai salah satu di mana Korea Selatan terlibat erat; konflik internal di Korea Utara meluas ke Selatan; atau dengan intervensi "pencegahan" ke Korea Utara dari Selatan untuk mencegah *spillover* atau untuk mencegah keadaan yang mungkin mengancam lainnya di Korea Utara. Dalam keadaan seperti ini, adalah masuk akal bahwa Amerika Serikat dan China akan bekerja sama - baik secara diam-diam atau terang-terangan - untuk mengakhiri konflik dengan meminta pasukan militer masing-masing melakukan intervensi untuk memulihkan dan menjaga ketertiban dan terutama untuk mencegah eskalasi lebih lanjut, terutama jika beberapa korban telah terjadi di salah satu atau kedua sisi. Kemungkinan juga konflik akan menimbulkan kerusakan besar pada persediaan modal Korea Selatan, yang akan meningkatkan biaya rekonstruksi di Korea Selatan daripada biaya modal langsung penyatuan kembali di Korea Utara. Opsi terakhir ini sering disebut sebagai ujung spektrum "terburuk". Penyatuan dalam konteks ini akan menjadi efek perang. (Stankiewicz, 2012)

Penyatuan kembali yang dicapai oleh salah satu skenario yang disajikan dan proses pembangunan kembali akan melibatkan penyesuaian yang tak terhitung jumlahnya untuk membentuk lembaga ekonomi, politik, dan lembaga sosial utama masyarakat baru. Nilai-nilai Selatan cenderung mendominasi karena keberhasilannya yang ditunjukkan dalam ekonomi global, dan karena demografi sederhana: dua pertiga dari populasi terpadu, mungkin 75 juta orang, akan menjadi warga Korea Selatan. Sementara membentuk masyarakat, orang biasanya membuat lima



lembaga utama untuk membangun ketertiban dan mentransmisikan nilai-nilai mereka kepada generasi berikutnya: keluarga, agama, pendidikan, ekonomi dan pemerintah.

Idiosyncratic dalam Decision Making Point

Walaupun sulit untuk memperkirakan motivasi sebenarnya perilaku politik dari seorang pemimpin, kita dapat melihat bahwa faktor subyektif dan faktor budaya menonjol dalam beberapa peristiwa sejarah dalam hubungan internasional, dengan kata lain: dilema keamanan dapat dilihat sebagai persepsi oleh pemimpin disebabkan faktor subyektif. Yang masih menjadi pertanyaan: karena setiap perbuatan terjadi karena suatu alasan yang dirasa menurut apa yang oleh para pengambil keputusan diyakini sebagai yang terbaik, apakah ada definisi umum untuk "yang terbaik"? bagaimana jika "yang terbaik" untuk negara A adalah yang terburuk untuk negara B?

Dalam bidang analisis politik luar negeri, pengaruh kepribadian pada pengambilan keputusan mungkin yang paling diperdebatkan. Peran kepribadian dalam politik luar negeri meliputi proses kognitif, latar belakang, karakteristik pribadi, motif, dan keyakinan, dan mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan adalah hasil dari 'agen manusia' atau individu; Artinya bahwa pada akhirnya, adalah individu yang membuat keputusan, bukan menyatakan. Jensen (1982) menggambarkan sebagai 'abstraksi hukum'. Kepribadian dapat menjadi penting dalam menambah pemahaman kita tentang perilaku politik luar negeri, tetapi relevansinya bergantung pada batasan sistem internasional serta struktur politik domestik.

Kepemimpinan. Kepemimpinan secara umum, kepribadian seorang pemimpin khususnya memainkan peran yang mendalam dalam perumusan politik luar negeri. Peran kepribadian dalam politik luar negeri meliputi proses kognitif, dan mengasumsikan bahwa pengambilan keputusan adalah hasil dari 'agensi manusia' individu; yaitu, pada akhirnya, itu adalah 'individu' yang membuat keputusan, bukan 'negara'. Dengan demikian, kepribadian bisa menjadi penting dalam menambah pemahaman kita tentang perilaku politik luar negeri.

Para pemimpin telah dikategorikan menjadi dua: 'elang' — mereka yang menganjurkan kebijakan luar negeri yang agresif berdasarkan kekuatan militer yang kuat, dan 'merpati' — mereka yang diistilahkan sebagai perdamaian dan mencoba menyelesaikan konflik internasional tanpa ancaman kekerasan. Menurut Hermann, pemimpin yang agresif dapat dicirikan dengan atribut tertentu seperti kecenderungan untuk memanipulasi orang lain, tingginya kebutuhan akan kekuasaan, paranoia, tingkat nasionalisme yang tinggi, dan kesediaan yang kuat untuk berinisiatif atas nama negara. Sedangkan pemimpin perdamaian di sisi lain, adalah kebalikan dari di atas. Mereka memiliki atribut seperti keinginan untuk berafiliasi dan bersahabat dengan orang lain, tingkat nasionalisme yang rendah, dll. (Bojang, 2018)

Presiden Park juga dapat dikategorikan sebagai pemimpin merpati dalam menjalankan pemerintahannya. Ini dapat dilihat dari Trust-Politik atau kepercayaan dalam membuat kebijakan saat pemerintahannya.

Kepercayaan. Kepercayaan atau keyakinan mengacu pada asumsi fundamental pemimpin politik tentang dunia. Apakah peristiwa dapat diprediksi, apakah konflik merupakan dasar interaksi manusia, dapatkah seseorang memiliki kendali atas peristiwa, apakah pemeliharaan kedaulatan dan keunggulan bangsa adalah tujuan terpenting suatu bangsa? Jawaban atas pertanyaan seperti ini menunjukkan beberapa keyakinan pemimpin politik.

Keyakinan diajukan oleh banyak orang untuk mempengaruhi interpretasi pemimpin politik terhadap lingkungannya dan pada gilirannya, strategi yang digunakan pemimpin tersebut. Dua dari karakteristik pribadi yang diteliti dalam penelitian ini termasuk dalam kategori keyakinan — nasionalisme dan keyakinan pada kemampuan seseorang untuk mengendalikan peristiwa. Memastikan keyakinan seorang pemimpin politik dalam pengendalian peristiwa dianggap fundamental dalam mengembangkan kode operasionalnya, cara seorang pemimpin politik mendefinisikan aturan dasar yang mengatur perilaku politik (Holsti, 1977). Keyakinan dan motif menyarankan cara menafsirkan lingkungan, pemimpin politik cenderung mendesak pemerintah mereka untuk bertindak dengan cara yang konsisten dengan gambaran tersebut. Secara khusus,

kepercayaan dan motif para pemimpin politik memberi mereka peta untuk memetakan arah mereka.

Keyakinan Presiden Park yang menganggap bahwa perdamaian dengan kepercayaan (trust) bisa terlaksanakan maka Park membuat politik luar negeri yang dinamakan trust-politik.

Budaya. Budaya memberi orang cara berpikir, melihat dan menafsirkan hal-hal di sekitar mereka. Ini membentuk ide-ide kita dan menjadi instrumen bagi kita dalam menganalisis segala sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Segala sesuatu mulai dari ciri ras kita, makanan yang kita makan, cara kita berpakaian, bahasa yang kita gunakan, musik yang kita dengarkan, dan di mana kita tinggal, semuanya merupakan bagian dari budaya.

Sekali lagi, urusan luar negeri sebagian besar merupakan warisan sejarah dan warisan budayanya. Pendekatan suatu bangsa terhadap masalah asing ditentukan oleh nilai-nilai dan kepercayaan tradisional yang muncul dalam kurun waktu bertahun-tahun. Pengalaman sejarah seperti budaya dan tradisi suatu negara, memberikan pengaruh pada politik luar negerinya. Secara umum, negara-negara dengan budaya yang bersatu dan sejarah yang sama merasa lebih mudah untuk merumuskan politik luar negeri yang efektif dan konsisten. Dalam kasus seperti itu, mayoritas orang, yang memiliki pengalaman dan persepsi yang sama tentang peristiwa sejarah, mendukung politik luar negeri negara. Namun, negara-negara dengan budaya yang berbeda dan pengalaman sejarah yang beragam di berbagai bagiannya, mengalami kesulitan untuk merumuskan politik luar negeri secara bersamaan.

Sistem Politik. Organisasi dan institusi politik di suatu negara, juga sangat mempengaruhi politik luar negeri negara tersebut. Secara umum, di bawah bentuk pemerintahan otoriter atau totaliter, keputusan luar negeri yang lebih mudah dan lebih cepat dimungkinkan karena kekuatan pengambilan keputusan berada pada individu yang dibantu oleh kliknya. Mereka adalah satu-satunya pembuat keputusan dan karena keputusan mereka dibuat tanpa kendala atau konsultasi apa pun, keputusan politik luar negeri mereka dapat menimbulkan konflik. Juga diamati bahwa pengambilan keputusan di bawah sistem tertutup seperti itu seringkali, jika tidak selalu, mengarah pada isolasi suatu negara dalam politik internasional seperti yang terjadi dengan rezim di Korea Utara. (Bojang, 2018)

Di sisi lain, dalam negara dengan sistem demokrasi, implementasi politik luar negeri cenderung sulit dan lambat dibandingkan dengan yang berstruktur otoriter. Warga negara dalam sistem ini dapat dengan bebas mengekspresikan dan menyuarakan pendapatnya tentang kebijakan dalam negeri maupun luar negeri negaranya, sehingga berdampak pada politik yang ditempuh oleh pemerintahnya. Para pemimpin demokrasi cenderung menanggapi tuntutan publik tersebut dan merumuskan politik luar negeri di dalamnya.

Trust-Politik

Trust-politik sebagai politik luar negeri adalah perpanjangan alami dari politik Presiden Park secara umum. Hasil yang berhasil dari KTT Korea Selatan-AS dan KTT Korea Selatan-Cina dimungkinkan karena ada rasa saling percaya antara para pemimpin dan perasaan bersama bahwa hubungan dapat dibangun di atas kepercayaan tersebut. Pengalaman historis juga memberi tahu bahwa di antara negara-negara, kemampuan untuk mempertahankan kerja sama selalu mencerminkan tingkat kepercayaan. Dalam hal ini, kepercayaan adalah aset dan infrastruktur publik untuk kerjasama internasional. Selain itu, tanpa kepercayaan, perdamaian yang berkelanjutan dan tulus tidak akan tercapai. Sebagai hasilnya, implementasi trustpolitik dapat dilihat sebagai upaya untuk menjalin tingkat kerjasama yang lebih tinggi di antara negara-negara yang dibangun atas dasar kepercayaan. *Trust-politik* bukanlah idealisme utopis yang menghindari dari realpolitik atau romantisme politik naif. Alih-alih, ini mempertimbangkan pengalaman sejarah Korea yang unik serta penilaian keras dari realitas politik di Semenanjung Korea, di Asia Timur Laut dan dalam komunitas internasional. (Yun, 2013)

Trust-Politik Process on the Korean Peninsula. *Trust-building Process on the Korean Peninsula* adalah suatu cara untuk membangun kepercayaan antara Korea Selatan dengan Korea Utara dan pergerakan hubungan antar Korea yang didasari keamanan yang kuat dalam tatanan



internasional untuk mencapai perdamaian akhir di Semenanjung Korea dan harapan unifikasi kedepannya. Melalui kebijakan *trust-building process on the Korean Peninsula*, Park ingin menetapkan dasar untuk mewujudkan era unifikasi yang harmonis di mana semua masyarakat Korea bisa hidup makmur dan bebas sehingga bisa mewujudkan impian mereka. Selain itu, Park ingin secara bertahap ingin membangun kepercayaan di Semenanjung Korea yang didasari pencegahan dari segala tindakan provokatif oleh Korea Utara. Menurut Park, trust bisa dibangun melalui dialog dan perjanjian yang telah ada sebelumnya sehingga nantinya Korea Utara bisa menerima norma-norma internasional dan bisa mengambil pilihan yang tepat dalam menjalankan pemerintahan. (*South Korean Ministry of Foreign Affairs, 2013*)

The Trust-building Process on the Korean Peninsula pertama-tama akan memastikan perdamaian berdasarkan pada sikap yang tegas dan tegas terhadap segala provokasi dari Korea Utara. Pada saat yang sama, upaya akan dilakukan untuk mempromosikan perkembangan hubungan internasional yang stabil. Alih-alih menerima dengan mudah atau bertahan tanpa henti perilaku memanjakan diri Korea Utara, itu berpegang pada sikap yang konsisten bahwa Pyongyang harus menghormati standar dan norma internasional dan mematuhi janji-janjinya, atau membayar penalti untuk janji-janji yang dilanggar. Kedua, membangun kepercayaan juga penting dalam mengatasi dinamika keamanan di Asia Timur Laut di mana perbedaan antara semakin saling ketergantungan ekonomi yang semakin dalam dan konflik yang semakin meningkat seputar isu-isu historis dan territorial yang tampaknya semakin menguat.

Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative. *Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative* (NAPCI) merupakan proses dialog yang bertujuan untuk membangun kepercayaan antar bangsa di Asia Timur Laut dengan memperkuat kebiasaan untuk dialog dan kerja sama dengan mengedepankan isu-isu non tradisional kemudian secara bertahap pada pengembangan lingkup kerja sama. Kebijakan ini coba diusung oleh Korea Selatan karena ketiadaannya tindakan-tindakan yang efektif dalam mencari sumber konflik yang ada di regional seperti isu teritori serta munculnya ancaman baru bersama tentang isu lingkungan dan pemanfaatan energi seperti halnya energi nuklir. Di mana hal tersebut menghalangi upaya-upaya untuk memaksimalkan penuh potensi untuk pengembangan regional. (*South Korean Ministry of Foreign Affairs, 2013*)

NAPCI bertujuan untuk mengubah struktur ketidakpercayaan dan konfrontasi yang ada menjadi salah satu kepercayaan dan kerja sama mulai dari membangun konsensus tentang isu-isu yang lebih lunak, namun sama pentingnya seperti perubahan iklim, lingkungan, bantuan bencana dan keselamatan nuklir. Inisiatif ini berupaya untuk secara bertahap mengembangkan kebiasaan kerja sama di antara para pemain regional sehingga pada akhirnya dapat berkontribusi untuk mengatasi masalah keamanan yang lebih serius seperti sengketa wilayah dan sejarah.

Eurasia Initiative. *Eurasia Initiative* merupakan inisiatif kerjasama dan strategi nasional yang besar yang diajukan oleh Korea Selatan guna bisa mencapai kemakmuran berkelanjutan dan perdamaian di Eurasia (Eropa dan Asia). Berdasarkan salah satu poin kebijakan ini, Korea Selatan melihat ancaman terhadap perdamaian dan keamanan merupakan hambatan besar dalam membangun kerja sama. Oleh karena itu permasalahan ancaman tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu agar bisa menghantarkan pada era baru Eurasia. Hal ini sesuai dengan masalah perdamaian yang terjadi di Semenanjung Korea. Perdamaian di Semenanjung Korea bukan hanya penting untuk Korea Utara-Korea Selatan, regional, maupun Eurasi tapi juga bagi seluruh masyarakat dunia. Korea Selatan menyadari kepercayaan merupakan suatu hal yang sangat penting bagi antar negara untuk menjalin kerja sama. Jadi pemerintah Korea Selatan berusaha berjuang untuk membangun Semenanjung Korea yang damai dan Eurasia sebagai "Benua Perdamaian." (*South Korean Ministry of Foreign Affairs, 2013*)

SIMPULAN

Berdasarkan apa yang telah dinarasikan dalam tulisan ini terdapat tiga skenario reunifikasi Korea yaitu *unification through system evolution and adaptation*, *unification through collapse and absorption*, dan *unification through conflict*. Presiden Park juga telah mencoba melakukan strategi politiknya dalam upaya mencapai reunifikasi di antara Korea Selatan dan Korea Utara dengan menggunakan *Trust-politik* yaitu *Trust-building Process on the Korean Peninsula, Northeast Asia*



Peace and Cooperation Initiative (NAPCI), dan *Eurasia Initiative*. Selain itu dilakukan penelitian tentang *idiosyncratic*, hal ini dikarenakan *idiosyncratic* merupakan salah satu faktor utama penyebab pengaruh pada pengambilan keputusan. Penelitian ini berujung pada kesimpulan bahwa Presiden Park selaku yang melakukan politik luar negeri *trust-politik* dengan adanya pengaruh *idiosyncratic* dalam aspek kepemimpinan, kepercayaan, budaya, dan sistem politik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amstutz, Mark R. (2013). *International Ethics: Concepts, Theories, and cases in Global Politics*. 4th Ed. Boulder: Rowman and Littlefield.
- Bogdan, R. and Taylor, S.J. (1975). *Introduction to Qualitative Research Methode*. New York: John Willey and Sons.
- Bojang, AS. (2018). The Study of Foreign Policy in International Relations. *Journal of Political Sciences & Public Affairs*, 6(4): 3-9
- Carlsnaes, Walter. (1987). *Ideology and Foreign Policy: Problems of Comparative Conceptualization*. Oxford: Basil Blackwell Ltd.
- Cheon, Seongwhun. (2013). *Trust–The Underlying Philosophy of the Park Geun-Hye Administration*. Diunduh di https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/publication/130506_Trust_President_Park.pdf tanggal 21 Desember.
- Choi, Young Back. (2001). *Perspectives on Korean Unification and Economic Integration*. Heatherley House: Edward Elgar Pub
- Coghlan, David. (2008). Prospects from Korean Reunification. *Strategic Studies Institute, US Army War College*, 17(101): 4-5
- Coplin, William D. (1992). *Pengantar Politik Internasional: Suatu telaah teoritis*. Bandung: Sinar Baru.
- Coulombis, Theodore A and James Hastings Wolfe. (1990). *Introduction to International Relations: Power and Justice*, New Jersey: Prentice Hall.
- Eby Hara, Abubakar. (2011). *Pengantar Analisis Politik Luar Negeri dari Realisme sampai Konstruktivisme*. Bandung: Nuansa.
- Evita. (2015). *Evolusi Kebijakan Luar Negeri Korea Selatan Terhadap Korea Utara: Trust-Politik Policy Park Geun-Hye*. Tesis. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.
- Falkowski, Lawrence S. (1979). *Psychological Models of International Politics*. Boulder, CO: Westview Press
- Hermann, M.G. (1980). Explaining Foreign Policy Behaviour Using the Personal Characteristics of Political Leaders. *International Studies Quarterly*; 24(1) 7-46.
- Hopple, G.W. (1980). *Political Psychology and Biopolitics: Accessing and Predicting Elite Behavior in Foreign Policy Crises*. Boulder, CO: Westview
- Jackson, R.H. (2001). The evolution of international society dalam J. Baylis & S. Smith, *The Globalization of World Politics*, 2nd edn. *Oxford University Press*, Oxford; 36.
- K J. Holsti, (1970). National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy. *International Studies Quarterly* Vol. 14, No. 3.
- Kim, A.J. (2014). Analysis on the Reunification Experiences of Germany, Vietnam, and Yemen: Finding an ideal process and conditions towards succesful reunification of Korea. *Summer Honors Research, Sweet Briar*: 3-4.
- Kim, Abraham. (2004). *The Challenges of Peacefully Reunifying the Korean Peninsula* dalam buku *Inter-Korean Relations: Problems and Prospects*, Samuel S. Kim, ed., New York: Palgrave Macmillan Press.
- Kim, Jung-kyu. (2015). *Park's Dresden Speech*. Diunduh di https://www.huffpost.com/entry/parks-dresden-speech_b_6955316 tanggal 16 Februari.
- Kirk, Jeerome dan Miller. (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Vol I. CA: Sage Publication.
- Kurnia, Ihsan. (2017). *Trust-Politik Policy Korea Selatan Sebagai Upaya Menurunkan Agresivitas Nuklir Korea Utara*. Skripsi. Universitas Andalas.
- Lincoln, YS. & Guba, EG. (1985). *Naturalistic Inquiry*. Newbury Park, CA: Sage Publications.
- Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, (1992). *Qualitative data Analysis*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Mintz, Alex & DeRouen, Karl. (2010). *Understanding Foreign Policy Decision Making*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Moleong, Lexy J. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Patton, Michael Quinn. (1987). *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. CA: Sage Publications.
- Perwita, A.A & Y. M., Yani. (2005). *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.



- Seran, Maria Fernanda Olifera. (2018). *Implementasi Kebijakan Trustpolitik Korea Selatan Masa Pemerintahan Park Geun Hye Tahun 2013-2016. Skripsi*. Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta
- Sheen, Seong-ho. (2014). Dilemma of South Korea's Trust Diplomacy and Unification Policy. *International Journal of Korean Unification Studies*, 23: 104-110
- Smith, Caitlin. (2012). *Personality in Foreign Policy Decision-Making*. Diunduh di <https://www.e-ir.info/2012/10/16/personality-in-foreign-policy-decision-making/> tanggal 8 November.
- South Korean Ministry of Foreign Policy. (2013). *Northeast Asia Peace and Cooperation Initiative: Moving beyond the Asian Paradox Toward Peace and Cooperation Initiative*. Ministry of Foreign Affairs.
- Stankiewicz, Wojciech. (2012). Current Prospects of Korean Reunification Against The Background of The Interstate Relations. *Interdisciplinary Political and Cultural Journal*, 14(1): 67-72
- Victor, Cha. (2016). *Five Theories of Korean Unification*. Diunduh di <https://beyondparallel.csis.org/5-theories-of-unification/> tanggal 13 Maret.
- Wolf Jr., C dan K. Akramov. (2005). North Korean Paradoxes: Circumstances, Costs and Consequences of Korean Unification. *RAND Corporation, Santa Monica*: 22-23.
- Wuryandari, Ganewati (ed). (2011). *Politik Luar Negeri Indonesia di Tengah Arus Perubahan Politik Internasional*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Yun, Byung-se. (2013). Park Geun-hye's Trustpolitik: A New Framework for South Korea's Foreign Policy. *Global Asia* 8, No. 3. Diunduh di https://globalasia.org/v8no3/cover/park-geun-hyes-trustpolitik-a-new-framework-for-south-koreas-foreign-policy_yun-byung-se tanggal 1 Desember.